

“Kontestasi” Perempuan dalam Pembangunan Manusia Berbasis Gender di Provinsi Papua Barat Tahun 2022

Luhjingga Panasari Urbaningrum

Universitas Jenderal Soedirman

Jl. Profesor DR. HR Boenyamin No.708, Dukuhbandong, Grendeng, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas

Email koresponden : luhjinggapanasari18@gmail.com

ARTIKEL INFO

Riwayat Artikel

Artikel masuk : 2023-09-25

Artikel direview : 2023-10-10

Artikel diperbaiki: 2023-10-15

Artikel diterima : 2023-10-17

Kata Kunci

Pengembangan berbasis gender
sistem patriarki
politik

ABSTRAK

This study aims to determine the contestation of women in gender-based development in West Papua Province in 2022. This is motivated by the large gap between men and women in human development. The method used is secondary data analysis. Data was obtained from the KPPA book in 2022 and statistical data from the Central Bureau of Statistics. The results showed that there is a gender gap and inequality in HDI in West Papua and Indonesia. This is due to the high patriarchal system in West Papua than in Indonesia. The patriarchal system has been preserved for generations. Another participation that involves women is their involvement in parliament. Although the government has given women a 30% parliamentary quota, this is far from being met in West Papua. In this case, women's contestation in the political sphere is also very minimal.

Keywords: gender based development, patriarchal system, politics

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontestasi perempuan dalam pembangunan berbasis gender di Provinsi Papua Barat tahun 2022. Hal ini dilatarbelakangi oleh besarnya gap antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan manusia. Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder. Data diperoleh dari buku KPPA tahun 2022 serta data statistik dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dan ketimpangan gender pada IPM di Papua Barat dan Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena tingginya sistem patriarki di Papua Barat daripada di Indonesia. Sistem patriarki tersebut telah dilestarikan secara turun menurun. Partisipasi lain yang melibatkan perempuan adalah keterlibatannya dalam parlemen. Meskipun pemerintah telah memberikan kuota parlemen sebesar 30% kepada perempuan, namun pada kenyataannya hal tersebut sangat jauh dipenuhi di Papua Barat. Dalam hal ini, kontestasi perempuan di ranah politik juga sangat minim keberadaannya.

Kata kunci: Pengembangan berbasis gender, sistem patriarki, politik



PENDAHULUAN

Salah satu perhatian utama dalam Upaya Pembangunan manusia adalah isu gender. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mencapai kesetaraan gender, hal tersebut tidak menekan adanya ketidaksetaraan gender dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan budaya yang memengaruhi perempuan dan laki-laki. Gender dapat diibaratkan seperti peran dalam teater, di mana seseorang mengenakan kostum dan topeng yang mencerminkan sifat feminine atau maskulin (Lusiarista & Arif, 2022). Sementara itu, menurut Giyono & Maemunah (2021), gender adalah perbedaan dalam peran dan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara social. Gender bukan sesuatu yang diberikan sejak lahir, tetapi merupakan konstruksi social yang dipengaruhi oleh berbagai factor seperti wilayah, budaya, ideologi, politik, dan ekonomi (Utaminingsih, 2017).

Isu gender adalah salah satu dari target-target dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu tujuan SDGs, yaitu target nomor 5, bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Kesetaraan gender dianggap sebagai suatu strategi yang bisa digunakan untuk mendorong perkembangan suatu daerah. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan serta manfaat yang dihasilkan dari program-program pembangunan, merupakan salah satu pendekatan yang dapat mempromosikan kesetaraan gender (Giyono & Maemunah, 2021). Ketidaksetaraan gender memiliki dampak negatif yang mencakup berbagai bidang pembangunan, dari ekonomi hingga aspek keamanan dan pertahanan negara (Aini, 2021). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjelaskan bahwa ketidaksetaraan gender adalah fenomena yang terjadi karena perlakuan atau persepsi yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Diskriminasi gender juga dapat terkait dengan faktor-faktor lain seperti ras, status sosioekonomi, usia, lokasi geografis, dan elemen-elemen lainnya. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang setara dan adil sebagai manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan politik. Namun, kenyataannya masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan. Catatan Tahunan (Catahu) 2022 dari Komnas Perempuan mencatat bahwa pada tahun 2022 terdokumentasikan sebanyak 338.496 kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang dialami oleh perempuan.

Berbagai langkah kebijakan yang diambil bertujuan untuk mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan gender. Seperti yang ditemukan di berbagai sektor pembangunan, terutama di tingkat daerah, kesenjangan gender masih sangat mencolok. Beberapa wilayah bahkan memiliki pencapaian yang rendah dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Beberapa kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia bahkan belum mampu mengimbangi peningkatan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Laporan Human Development Report (HDR) tahun 2019 menyatakan bahwa pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada tingkat sedang, mencapai 70,7, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 69,4. Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia tergolong dalam kategori IPM tinggi, meskipun peringkatnya dalam skala global mengalami perubahan. Pada tahun 2016, peringkat Indonesia adalah yang ke-113, lalu turun menjadi ke-116 pada tahun 2017, tetapi meningkat menjadi ke-111 pada tahun 2018 dari total 189 negara. Di Asia Tenggara, Indonesia berada pada posisi yang tinggi, meskipun berada di bawah Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura, dengan peringkat keenam (UNDP 2019).

Studi yang dilakukan oleh Kacaribu et al (2013) tentang indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, rasio kemiskinan terhadap populasi, rasio jumlah penduduk terhadap jumlah dokter, rasio jumlah penduduk terhadap jumlah bidan, rasio jumlah penduduk terhadap jumlah perawat, serta rasio murid SMA terhadap guru, semuanya memiliki dampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua. Namun, terdapat pengecualian dalam hubungan antara rasio murid SD terhadap guru dan rasio murid SMP terhadap guru yang tidak berpengaruh terhadap IPM di wilayah ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh kondisi kurang memadainya fasilitas pendidikan dan kesehatan di Provinsi Papua. Dengan demikian, untuk meningkatkan IPM di Provinsi Papua, perlu

diperhatikan peningkatan infrastruktur dan fasilitas dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Ini mencakup peningkatan jumlah pengajar, pendirian puskesmas, serta peningkatan jumlah tenaga medis seperti dokter, bidan, dan perawat di setiap kecamatan di Provinsi Papua. Sehingga, perbaikan dalam sektor-sektor ini dapat mendukung peningkatan IPM di wilayah tersebut.

Studi tersebut merupakan salah satu studi terbaru yang membahas indeks pembangunan manusia di provinsi Papua Barat. Berdasarkan hasil studi, penelitian tersebut masih terfokus terhadap IPM pada bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, dari sudut pandang gender belum nampak keberadaannya. Atas dasar hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk menelaah indeks pembangunan manusia berbasis gender di Provinsi Papua Barat yang disertai juga keterlibatannya dalam bidang politik.

METODE PENELITIAN

Analisis berjudul "Kontestasi Perempuan dalam Pembangunan Manusia Berbasis Gender di Provinsi Papua Barat Tahun 2022" dilakukan atas dasar sumber data sekunder yang berasal dari buku "Pembangunan Manusia Berbasis Gender (PMBG) Tahun 2022" yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Buku tersebut berisi data yang terkait gender sepanjang tahun 2022. Tahun 2022 dipilih sebagai titik fokus analisis karena data pada tahun tersebut merupakan data terbaru dan paling terkini sehingga dapat menggambarkan situasi pembangunan gender pada waktu yang faktual. Untuk menilai hasil pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender di Provinsi Papua Barat, dilakukan analisis perbandingan dengan hasil pencapaian di tingkat nasional dengan menggunakan sumber data yang sama, sehingga memiliki nilai perbandingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. IPM dan IPG di Provinsi Papua Barat dan Indonesia Tahun 2022

Provinsi Papua Barat merupakan satu provinsi yang terletak di Pulau Papua selain Provinsi Papua. Provinsi Papua Barat terletak di antara 00-4- Lintang Selatan dan antara 1240-1320 Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografis, Provinsi Papua Barat memiliki perbatasan: Utara – Samudera Pasifik; Selatan – Laut Banda, Provinsi Maluku; Barat – Laut Seram, Provinsi Maluku; Timur – Provinsi Papua. Luas wilayah Papua Barat yaitu mencapai 102.946,15 km persegi yang terdiri dari 13 kabupaten/kota.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah, yang mencakup tiga bidang utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Ketiga elemen tersebut dapat mencerminkan kualitas hidup manusia. Sejak tahun 2015, terdapat perubahan dalam metode perhitungan IPM yang juga berdampak pada perubahan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Saat ini, IPG dirumuskan sebagai perbandingan antara IPM perempuan dan IPM laki-laki. Dengan pendekatan ini, perhitungan IPM terbagi berdasarkan jenis kelamin, yang memungkinkan evaluasi kualitas pembangunan, baik pada laki-laki maupun perempuan, dapat dilakukan secara terpisah. Nilai IPG digunakan sebagai alat untuk menganalisis perbandingan tingkat pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Semakin mendekati angka 100, semakin kecil kesenjangan pembangunan antara keduanya. Selain itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dihitung untuk mengukur sejauh mana perempuan terlibat dan berperan aktif dalam bidang politik dan ekonomi. Berikut merupakan tabel perhitungan IPM dan IPG di tingkat Provinsi Papua Barat dan Nasional tahun 2022.

Tabel 1. IPM dan IPG dan Komponennya Tahun 2022

Wilayah	Harapan Hidup (tahun)		Harapan lama sekolah (tahun)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran perkapita disesuaikan (Rp)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Papua Barat	64,33	68,05	13,48	12,93	10,42	7,53	11,554	5,495	72,92	60,52	83,00
Indonesia	69,93	73,83	12,96	13,28	8,99	8,39	16,215	9,281	76,73	70,31	91,27

Sumber: KPPA dan BPS (2022)

Berdasarkan pada tabel di atas, terlihat adanya kesenjangan angka IPM pada laki-laki dan perempuan di Provinsi Papua Barat pada tahun 2022. Tertera bahwa IPM laki-laki sebesar 72,92 dan IPM perempuan sebesar 60,52. Tingginya kesenjangan gender pada IPM laki-laki dan perempuan di Provinsi Papua Barat menghasilkan angka IPG yang rendah, yaitu sebesar 83,00. Jika dibandingkan dengan IPG nasional, angka tersebut masih tertinggal jauh (91,27). Dari sudut pandang IPM, angka IPM Papua Barat juga cenderung lebih rendah dengan IPM nasional baik pada laki-laki maupun perempuan. IPM laki-laki Papua Barat sebesar 72,92 dan nasional sebesar 76,73. Sementara itu, IPM perempuan Papua Barat sebesar 60,52 dan nasional sebesar 70,31. Data-data tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan gender di Papua Barat memiliki jurang yang sangat besar. Secara geografis, Papua merupakan provinsi yang berada pada bagian terluar di Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab adanya kesenjangan gender terjadi karena sumber daya manusia yang rendah (Latuconsina, 2017). Untuk melihat lebih jelas perbandingan IPM DI Provinsi Papua Barat dan Nasional, dapat dilihat pada *bar* di bawah ini.



Gambar 1. IPM dan IPG Papua Barat dan Indonesia Tahun 2022

layak dari penduduk dalam wilayah tersebut (Melliana & Zain, 2013). IPM juga dikenal sebagai suatu alat kebijakan yang merangkum berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kesejahteraan (Spangenberg, 2015). Dengan begitu, IPM digunakan untuk memberikan gambaran holistik tentang tingkat kesejahteraan, termasuk aspek ekonomi dan non-ekonomi (Aji et al, 2014).

Terdapat pula salah satu istilah yang disebut sebagai Pembangunan Milenium (MDGs). Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goals (disingkat MDGs) merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium PBB bulan September 2000 silam. Sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani Deklarasi MDGs, Indonesia mempunyai komitmen untuk melaksanakan program-program MDGs sebagai bagian yang tak terpisahkan dari program pembangunan nasional baik jangka

pendek, menengah dan panjang (Juhardi et al., 2011; Latifah, 2011). MDGs menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan sehingga nilai IPM menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu wilayah/negara dalam melaksanakan MDGs. IPM digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (pendidikan).

Berdasarkan angka IPM antara laki-laki dan perempuan di Papua Barat, terjadi selisih dan ketimpangan gender yang besar. Salah satu elemen yang menyokong besarnya ketimpangan gender adalah pada bagian pengeluaran perkapita, yaitu antara laki-laki (11,554) dan perempuan (5,495). Berdasarkan data statistik Papua Barat dalam data tahun 2022, sebagian besar masyarakat Papua Barat, khususnya laki-laki, memiliki mata pencaharian sebagai nelayan (BPS, 2022). Mata pencaharian lainnya yaitu buruh tani, pedagang kecil, dan petani kebun pribadi. Meskipun Papua Barat berdekatan dengan lokasi PT Freeport Indonesia, sebagian besar pegawai PT Freeport Indonesia hanya menyerap tenaga kerja yang berasal dari luar pulau Papua. Keterangan-keterangan mengenai mata pencaharian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar yang berperan atas pekerjaan tersebut adalah laki-laki. Mereka cenderung mengambil alih seluruh sektor nondomestik sehingga pengeluaran yang dikeluarkan cenderung lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Para laki-laki, khususnya yang sudah berkeluarga, menghabiskan pendapatan perkapita lebih besar karena mereka harus menghidupi seluruh keluarganya. Berbeda dengan perempuan, mereka cenderung lebih dominan di sektor domestik. Bagi perempuan yang sudah menikah, mereka menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Meskipun demikian, perempuan di Papua Barat juga turut serta berpartisipasi pada dunia kerja. Hanya saja, peran perempuan di dunia nondomestik sangat kecil dibandingkan dengan laki-laki.

Perempuan di Papua Barat berpartisipasi dalam hal pertanian dan perdagangan. Mereka juga memberdayakan dirinya sendiri dengan menciptakan usaha kecil seperti menjual tas dari rajutan serat kayu. Namun hal-hal tersebut tidak menghasilkan pendapatan yang besar seperti laki-laki. Tugas utama mereka sebagai perempuan adalah harus berperan besar pada sektor domestik.

Situasi seperti ini membentuk karakter masyarakat yang terbentuk sejak zaman dahulu. Meskipun tidak signifikan, sumber daya manusia di Papua Barat dapat memajukan pembangunan daerah. Hal ini juga memiliki sisi negatif dalam pandangan antropologi yang menganggap bahwa di suku-suku di pedalaman, potensial untuk timbulnya konflik atau perang suku terkait budaya. Perlu dicatat bahwa konflik antar suku di Papua telah ada sejak zaman peradaban batu. Pertempuran suku di Papua Barat telah ada dan umumnya dipimpin oleh kaum laki-laki, hal ini karena dalam kerangka kehidupan adat dan budaya, jabatan panglima perang telah ada. Sejak usia dini, anak laki-laki Papua dipersiapkan dan melalui seleksi alam untuk menjadi seorang prajurit perang (Pranowo & Hakim, 2017). Oleh karena itu, laki-laki terdorong untuk menjadi orang kuat yang mampu berpartisipasi dalam konflik, dan memiliki prestise yang tinggi dalam komunitas jika mereka memiliki kekuatan fisik yang cukup untuk memimpin sebagai seorang panglima atau ketua kelompok. Sementara itu, perempuan dianggap sebagai pribadi yang lemah dan harus bertanggung jawab di sektor domestik saja.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Papua Barat dan Indonesia Tahun 2022

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah sebuah indikator yang mencerminkan peran gender dalam sektor politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan (Alfiana, 2015). Kesetaraan dan keadilan gender diartikan sebagai situasi di mana peran laki-laki dan perempuan sejajar, setara, seimbang, dan harmonis. Kesetaraan gender tidak hanya berkaitan dengan mencapai status atau posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan, melainkan lebih tentang peran yang setara. Dalam konteks ini, peran perempuan dalam pemerintahan, pengambilan keputusan politik, dan aktivitas ekonomi, khususnya kontribusi perempuan terhadap pendapatan rumah tangga, menjadi aspek yang penting (Dini et al., 2020). IDG terdiri dari tiga komponen utama: partisipasi

perempuan di parlemen, peran perempuan sebagai tenaga profesional, dan kontribusi pendapatan yang berasal dari perempuan. IDG ini digunakan untuk menilai sejauh mana kesetaraan gender terwujud dalam hal peran aktif dalam politik, ekonomi, dan proses pengambilan keputusan (Wisnujati, n.d.). Gender dalam konteks pemberdayaan perempuan menjadi analisis kontribusi perempuan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada keberhasilan pembangunan manusia. Berikut merupakan tabel 2 yang berisikan tentang perbedaan capaian IDG di Provinsi Papua Barat dan Indonesia tahun 2022.

Tabel 2. IDG Provinsi Papua Barat dan Indonesia Tahun 2022

Wilayah	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sbg Tenaga Manajer, Profesional, Admn, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
Papua Barat	14,29	41,61	28,22	61,93
Indonesia	21,74	48,65	37,17	76,59

Sumber: BPS, 2022

Tabel tersebut menunjukkan jumlah besaran IDG pada tiga komponen. Papua Barat menyentuh angka 61,93 sementara Indonesia jauh lebih tinggi yaitu sebesar 76,59. Elemen tertinggi penyumbang IDG baik di Papua Barat dan Indonesia adalah keterlibatan perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi dengan masing-masing sebesar 41,61 dan 48,65. Jumlah ini memiliki jurang yang tidak terlalu signifikan. Data BPS Papua Barat dalam Angka (2022) menunjukkan sebesar 17.953 perempuan termasuk kedalam Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara itu laki-laki sebesar 21.115 orang. Jika dilihat pada besaran tenaga profesional seperti ASN, selisih antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu signifikan.

Sementara itu, elemen penyumbang paling sedikit adalah terdapat pada keterlibatan perempuan di parlemen. Baik di Indonesia dan di Papua Barat belum menyentuh kuota yang telah ditetapkan (30%). Masing-masing dari wilayah tersebut hanya menyumbangkan 14,29 dan 21,74. Berikut merupakan tabel keterlibatan perempuan di parlemen Provinsi Papua Barat tahun 2022.

Tabel 3. Keterlibatan dalam Parlemen di Provinsi Papua Barat

Partai Politik	L	P	Jumlah
GOLKAR	6	2	8
NASDEM	6	1	7
PDIP	6	1	7
DEMOKRAT	5	1	6
GERINDRA	3	0	3
HANURA	2	1	3
PKS	2	0	2
PKPI	2	0	2
PERINDO	1	1	2
PAN	3	0	3
PKB	2	0	2
Jumlah	38	7	45

Sumber: BPS, 2022

Dari tabel tersebut dapat dikatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam parlemen di Papua Barat sangat jauh dari presentasi target sebesar 30%. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Indonesia, disebutkan bahwa partisipasi yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan harus diperluas dan merata. Partisipasi dalam konteks ini mengacu pada keterlibatan dalam mengemban tanggung jawab dalam pelaksanaan serta menerima hasil-hasil pembangunan khususnya dalam bidang politik. Walaupun istilah "partisipasi" telah menjadi semacam ungkapan yang umum digunakan dalam ranah politik,

implementasinya dalam proses pembangunan masih belum memiliki definisi yang pasti. Partisipasi dalam politik juga masih menjadi hal yang rancu di Indonesia (Hasanah & Musyafak, 2017). Kenyataan dalam dunia politik di Indonesia, mengharuskan partisipasi dari seluruh kalangan termasuk wanita namun terdapat isu-isu seputar peran dan posisi gender antara laki-laki dan perempuan. Kehadiran perempuan dalam politik sangat penting karena mereka memiliki peran dalam menentukan nasib mereka sendiri melalui keputusan-keputusan politik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai dasar konstitusi negara, memberikan hak kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan tanpa memandang jenis kelamin. Meskipun demikian, saat ini gambaran profil perempuan di Indonesia dapat dijelaskan sebagai individu yang hidup dalam situasi yang penuh dilema, karena masih ada persepsi yang melekat pada perempuan sebagai kelompok yang memiliki peran kedua setelah laki-laki (Nimrah & Sakaria, 2015).

Peran perempuan dalam pembangunan bertujuan untuk kepentingan perempuan itu sendiri. Tuntutan peran perempuan dalam proses pembangunan mendorong konsep peran ganda atau keterlibatan setara, yang tidak hanya membatasi peran perempuan sebagai mitra sejajar dalam pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, tetapi juga mendorong mereka untuk terlibat dalam tahap pelaksanaan. Namun, di Indonesia, peran ganda dan peran sebagai mitra sejajar perempuan dalam praktiknya belum berjalan dengan optimal. Saat ini, perempuan terutama terlibat dalam tahap partisipasi politik, seperti sebagai peserta dalam pemilihan umum, sementara harapan selanjutnya adalah agar lebih banyak perempuan terpilih dalam pemilihan umum. Meskipun demikian, keterpilihan perempuan saat ini masih belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu 30 persen (Priandi & Roisah, 2019). Berdasarkan hal tersebut, berikut merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam dunia politik (Priandi & Roisah, 2019).

- 1) Pendidikan politik dimulai dari lingkungan keluarga. Pendidikan politik dalam konteks non-formal juga harus diimplementasikan, seperti melibatkan keluarga dalam mendorong anggota keluarganya untuk berbicara dan berdiskusi mengenai isu-isu politik yang sedang berlangsung di tengah masyarakat. Keluarga adalah media sosialisasi paling awal yang penting ketika seorang perempuan memasuki dunia politik, dan keluarga juga berperan sebagai wadah pertama di mana perempuan dapat berbicara tentang isu-isu politik setelah terlibat dalam aktivitas masyarakat. Ketertarikan perempuan terhadap politik juga mendorong minat mereka untuk terlibat dalam pemilihan umum, sehingga meningkatkan peluang bagi perempuan untuk menduduki posisi di parlemen.
- 2) Perempuan yang mengikuti pendidikan politik dari tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi sebaiknya dirangsang untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai organisasi, seperti OSIS, BEM, serta organisasi-organisasi ekstrakurikuler universitas seperti HIMA atau organisasi lainnya. Dengan demikian, perempuan secara tidak langsung telah mempersiapkan diri mereka untuk menjadi pemimpin di masa depan.
- 3) Melakukan advokasi agar kaum perempuan merasa terdorong untuk terlibat aktif dalam arena politik dengan fokus pada meningkatkan kesadaran mengenai kebutuhan pemenuhan hak-hak yang adil bagi perempuan dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Tujuannya adalah mendorong partisipasi perempuan dalam politik dengan harapan bahwa mereka akan memiliki kontribusi yang signifikan dalam perjuangan untuk kepentingan kelompok mereka.

Memberikan penerangan, meningkatkan kesadaran, dan memberikan dorongan kepada perempuan agar terlibat dalam berbagai kegiatan politik, termasuk ikut serta dalam kampanye politik, berperan sebagai pemilih, mencalonkan diri sebagai legislator, calon Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati, dan sejenisnya.

PENUTUP

Hasil analisis menunjukkan bahwa IPM di Papua Barat memiliki besaran yang rendah dibandingkan dengan di Indonesia, yaitu hanya sebesar 83,00. Jika dibedah menjadi laki-laki dan perempuan, hal tersebut terjadi ketimpangan. Laki-laki memiliki IPD sebesar 72,92 dan perempuan hanya sebesar 60,52 di provinsi Papua Barat. Hal tersebut mencerminkan bahwa masih terdapat kesenjangan dan ketidaksetaraan dalam berbagai bidang antara laki-laki dan perempuan. Keberadaan besarnya gap kesenjangan gender tersebut menimbulkan besaran IDG di Papua Barat hanya sebesar 61,93, berbanding jauh dengan Indonesia sebesar 76,59. Ini menunjukkan bahwa dalam berbagai bidang, kontestasi perempuan dapat dikatakan sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut disebabkan karena tingginya sistem patriarki di Papua Barat yang telah terjadi pada zaman dahulu dan terlestarikan hingga sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. N. (2021). Analisis Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 16(1), 77- 91.
- Aji, S., Syarifudin, D., & Ishak, R. F. (2014). Identifikasi tipologi wilayah perbatasan antar kabupaten/ kota dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat. *Proceeding Presentasi Hasil Penelitian Hibah Program Desentralisasi, Sentralisasi dan Hibah Internal Unpas 2014*, 145-149. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Pasundan.
- Alfiana, M. A. F. dkk. (2015). Dinamika Pembangunan Manusia Berbasis Gender di Indonesia. In *Seminar Geografi UMS*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Papua Barat Dalam Angka. Papua Barat.
- Badan Pusat Statistik. (2022). <https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab3>
- Dini, I. M., Fajriyah, Mahdiah, Y., Fahmadia, E., & Lukitasari, I. (2020). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*. Publikasi Badan Pusat Statistik.
- Giyono, U., & Maemunah. (2021). Perempuan Dalam Indeks Pembangunan Manusia (Kajian IPM-IPG dan IDG Sumber Kemenpp Tahun 2019). *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 75-86.
- Hasanah, U., & Musyafak, N. (2017). Gender and Politivs: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik. *SAWWA*. 12(2), 409-432.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. (2022). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2022*. Jakarta.
- Latuconsina, Z. M. Y. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*. 1(2), 202-216).
- Lusiarista, & Arif, M. (2022). Peran Perempuan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Pati Periode 2015-2020. *Sosial Science Studies*, 2(3), 197-214.
- Melliana, A. & Zain, I. (2013). Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains dan Seni Pomits*. 2 (2), D237–D242
- Nimrah, Siti., & Sakaria. (2015). Perempuan dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014). *Jurnal The Politics*, 1(2), 173-182
- Pranowo, P., & Hakim, F. N. (2017). Retrospeksi Model Pengembangan Manusia di Daerah Pedalaman Pegunungan dan Perbatasan Papua-Papua Nugini. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. 41(1), 93-106.

- UNDP. 2019. Indonesia Masuk Dalam Kelompok IPM Tinggi. <https://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home1/presscenter/pressreleases/2019/Indonesia-masuk-ke-dalam-kelompokkategori-pembangunan-manusiatinggi.html>.
- Utaminingsih, A. (2017). Gender dan Wanita Karir. Malang: UB Press.
- Wisnujati, N. S. (n.d.). Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro. 20(2), 67–81